



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali Post

Kategori : BMD

Gerah pada Manajemen Hotel BKD Tempeli Stiker Penunggak Pajak

Singaraja (Bali Post) -

Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng mulai gerah dengan manajemen hotel dan restoran yang tidak menyetorkan pungutan pajak dari wisatawan yang berlibur ke Buleleng. Atas perilaku tidak disiplin itu, BKD gencar menjatuhkan sanksi. Caranya, dengan memasang stiker untuk menunjukkan kalau hotel tersebut menunggak pajak.

Pemasangan stiker penunggak pajak itu dilakukan Kamis (12/9) kemarin. Pemberian sanksi itu menasar Hotel Singaraja yang merupakan eks Hotel Pop Hardy's Singaraja. Hotel yang ada di tepi pantai kawasan Dermaga Eks Pelabuhan Buleleng itu, bukan saja menunggak pajak, juga didenda sejak tahun 2018. Rinciannya, pajak hotel senilai Rp 427.608.177, pajak restoran Rp 15.786.362 dan pajak air tanah Rp 298.750.

Pemasangan stiker kemarin dipimpin Kepala Bidang (Kabid) Pajak Daerah Gede Sasmita Ariawan didampingi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasapol PP) Putu Dana. Sebelum menempelkan stiker di lobi hotel itu, dilakukan pertemuan dihadiri Manajer Hotel Singaraja Putu Darma Sartikayasa.

Gede Sasmita Ariawan mengatakan, sebelum pihaknya menjatuhkan sanksi dengan menempel stiker penunggak pajak, pihaknya sudah memberikan surat peringatan pertama. Tujuh hari berselang peringatan pertama itu, pihak manajemen belum juga melunasi pajaknya, sehingga kembali dikirim surat peringatan kedua. Sesuai Peraturan Bupati (Perbup) No. 18 tahun 2018 pasal 11 ayat 5, BKD diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi penempelan stiker. Dari sanksi ini, manajemen diharapkan sadar dan melunasi tunggakan pajaknya, baik itu pokok pajak dan denda yang

sudah tercatat.

"Kami menempel stiker itu bukan ujug-ujug (tanpa dasar-red). Sebelum ini, ada tahapannya. Diawali peringatan pertama dan belum juga ada tindak lanjutnya, lalu peringatan kedua. Pajak belum juga dibayar, maka sesuai Perbup itu, kami ditugaskan memasang stiker. Sanksi itu berlaku sampai tunggakan pajak itu dilunasi," katanya.

Terkait sanksi lanjutan, Sasmita Ariawan menyebut, upaya penegakan hukum seperti diatur Peraturan Daerah (Perda) No. 8 tahun 2011 tentang Pajak Hotel itu bisa saja dilakukan. Namun sebelum tahapan itu, BKD masih mengutamakan sanksi persuasif. Harapannya agar pihak manajemen ada kemauan menyetorkan pajak yang dititipkan oleh setiap wisatawan yang membeli jasa akomodasi wisata itu.

Pendekatan Persuasif

"Soal penegakan hukum (yustisinya) memang ada sesuai amanat perda. Namun belum sampai ke ranah hukum itu. Pendekatan persuasif ini akan kita utamakan. Namun, tidak menutup kemungkinan penegakan hukum akan diambil sesuai arah kebijakan pimpinan kami," jelasnya.

Manajer Singaraja Hotel Putu Darma Sartikayasa mengaku, pihak manajemen sudah mengupayakan melunasi tunggakan pajak itu. Hanya, karena human tamu sepi dan

ditambah permasalahan internal perusahaan, sehingga tunggakan pajak itu belum dilunasi. Namun, sanksi yang sudah dijatuhkan oleh BKD dan Satpol PP, Sartikayasa mengaku dalam waktu dekat akan dilaporkan kepada *owner* Singaraja Hotel. Terkait kemungkinan akan dilunasi atau tidak, pihaknya belum bisa menjamin. Alasannya, hal itu sepenuhnya kebijakan dan keputusan *owner* perusahaan.

"Kami tidak mencari-cari alasan. Tetapi fakta dan mungkin sudah diketahui masyarakat kalau hotel ini berada satu pengelolaan dengan manajemen Hardy's yang sudah bangkrut. Jadi, imbas itu membuat hotel ini tidak bisa berbuat banyak. Ditambah situasi tamu sepi, sehingga kami fokus pemenuhan biaya operasional perusahaan saja," jelasnya.

Di sisi lain, Sartikayasa menambahkan, imbas sanksi penempelan stiker penunggak pajak itu membuat *image* perusahaan semakin tidak baik. Tidak heran, dirinya hanya bisa pasrah. Namun, tetap berupaya mengikuti aturan tertib pajak kepada pemerintah.

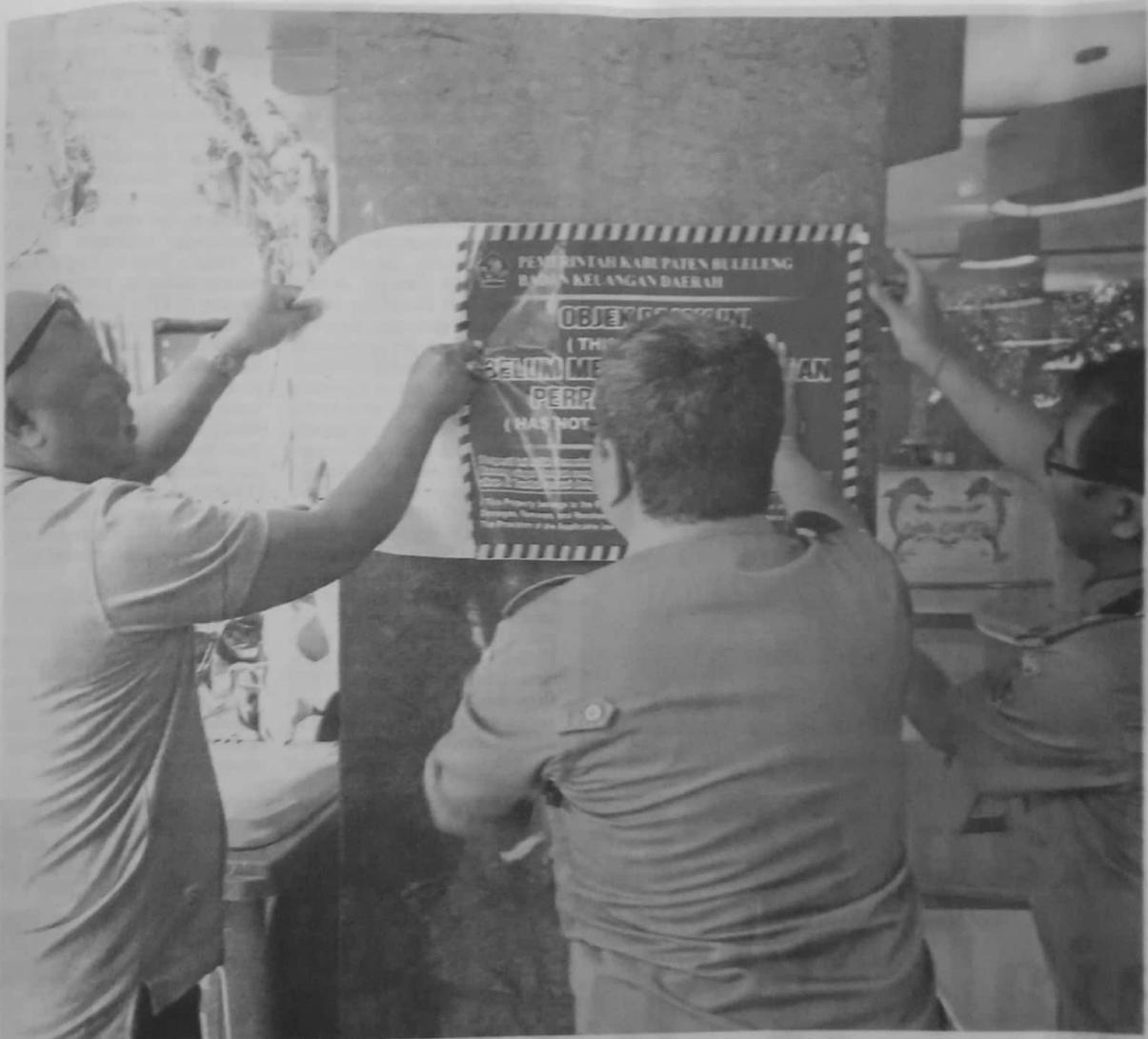
"Perusahaan apa pun kalau ditempel stiker seperti ini, tidak baik ketika dilihat oleh tamu. Apa pun itu, kami tidak bisa berbuat banyak. Upaya kami adalah berusaha keras melunasi tunggakan pajak yang sudah tercatat di BKD itu," jelasnya. (kmb38)



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media :

Kategori : *Sambungan*



Bel Pajak/003
NUNGGAK PAJAK - BKD bersama Satpol PP Buleleng menjatuhkan sanksi dengan menempel stiker untuk hotel yang menunggak menyeter pajak hotel, pajak restoran, dan pajak air tanah.



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali Post

Kategori : PDAM

Pemanfaatan SPAM Regional Burana-Titab PDAM Rancang Tambah 20 Ribu Pelanggan Baru

Singaraja (Bali Post) -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR-RI) sedang membangun Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) Regional Burana-Titab. Paket pembangunan infrastruktur bidang air minum ini merupakan lanjutan pemanfaatan sumber mata air Bendungan Titab-Ularan. Dari pembangunan SPAM ini, nantinya Buleleng mendapat jatah pemanfaatan sumber mata air baku dengan debit sekitar 300 liter per detik. Dengan tambahan produksi air baku itu, diperkirakan dapat memenuhi 20 ribu pelanggan air minum di Bali Utara.

Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Buleleng Made Lestariana belum lama ini mengatakan, saat ini pembahasan teknis terkait pemanfaatan air baku Bendungan Titab-Ularan itu melalui jaringan SPAM Regional Burana-Titab yang baru tahap awal. Dari pembahasan yang pernah diikuti, SPAM Regional itu akan beroperasi pada 2020 mendatang. Jaringan ini secara penuh dikelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Minum Dinas PUPR Bali. Dari pengelolaan itu, Buleleng memperoleh produksi air

bersih 300 liter per detik dari total produksi air baku yang dikelola di bendungan itu. Hanya, skema pemanfaatan dari UPT itu masih proses kajian. Sejauh ini, PDAM akan mempersiapkan kajian terutama besaran tarif penjualan air bersih dari UPT tersebut melalui perhitungan manajemen PDAM Buleleng. "Kita baru pembahasan awal. Memang Buleleng akan

mendapatkan 300 liter per detik. Nantinya, pemberian debit air sebesar itu diatur UPT Pengelolaan Air PUPR Bali. Nanti akan ada pembahasan lebih lanjut. Kami yang akan mengelola juga masih menghitung air yang akan kita kelola penuh untuk pelanggan," katanya.

Meskipun baru pembahasan awal, Lestariana mengagaku pembangunan jaringan

SPAM Regional Burana-Titab itu, sangat membantu PDAM dalam menambah kapasitas produksi air bersih untuk pelanggan setianya. Ini karena persediaan sumber air baku di daerahnya sekarang semakin sulit. Apalagi saat musim kemarau seperti sekarang ini, mata air baku yang dikelola PDAM itu mengalami penurunan debit. Untuk itu, setelah jatah produksi air



Bali Post/kmb38

SPAM REGIONAL - Jaringan SPAM Regional Burana-Titab sedang dikerjakan. Dari infrastruktur yang sedang digarap ini, Buleleng mendapat produksi air bersih dari air baku Bendungan Titab-Ularan 300 liter per detik.

dari SPAM itu, maka diyakini PDAM dapat meningkatkan cakupan pelayanan terutama di Kecamatan Banjar, Seririt, dan Gerokgak. Estimasi awal, untuk tiga kecamatan itu, akan dapat memenuhi air minum untuk tambahan pelanggan baru. Diperkirakan, ada sekitar 20 ribu pelanggan baru di wilayah Buleleng Barat itu.

"Kita sangat perlu tambahan produksi air itu. Peralnya, untuk mengantisipasi penurunan debit ketika kemarau tiba. Selain itu menjawab tuntutan penambahan pelanggan baru. Sehingga kalau produksi SPAM Regional ini beroperasi 100 persen, maka akan ada tambahan pelanggan baru sekitar 20 ribu," katanya.

Pria yang juga menjabat Ketua Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Buleleng itu menambahkan, selain mempersiapkan pemanfaatan SPAM Regional, tahun ini, pihaknya memprogramkan penambahan pelanggan baru tiga ribu. Rinciannya, 1.000 pelanggan baru melalui program layanan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, dua ribu tambahan pelanggan baru dari program reguler yang sudah disusun pada program kerja PDAM Buleleng (kmb38).

Sub Bagian Dokum

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali Post

Kategori : Pelanggaran

1.129 Pelanggar Terjaring Selama Operasi Patuh Agung 2019

Operasi Patuh Agung tahun 2019 resmi ditutup. Operasi lalu lintas itu berlangsung selama sebelas hari. Selama operasi itu, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Buleleng menemukan 1.129 pelanggaran. Ribuan pelanggaran ini sebagian besar akibat pengendara tidak menggunakan helm dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), selain itu tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), melawan arus, tidak menggunakan sabuk pengaman dan jenis pelanggaran lain. Lalu, bagaimanakah harapan pihak Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng kepada warga agar menaati segala ketentuan sebagai pengendara yang baik?

SATLANTAS tidak saja mencatat total jumlah pelanggaran yang berhasil ditindak sebanyak 1.129 pelanggaran. Polisi juga membukukan jenis profesi pengendara yang melanggar. Ada sebagai karyawan swasta, pelajar, hingga mahasiswa. Kasat Lantas AKP Putu Diah Kurniawandari sezin Kapolres Buleleng AKBP Suratno, S.IK., Kamis (12/9) kemarin mengatakan, selama Operasi Patuh Agung 2019, total pelanggaran tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) 342 orang, 195 pengemudi

tidak memakai sabuk pengaman, 53 pengendara melawan arus, 45 pengendara di bawah umur, dan pelanggaran lainnya dilakukan oleh 449 pengendara sepeda motor dan 126 oleh pengemudi roda empat. Barang bukti yang berhasil disita yakni SIM 181, STNK 943, dan 92 unit kendaraan berbagai jenis.

"Hasil operasi tahun ini dibandingkan tahun 2018. Jumlah penindakannya mencapai 96 persen. Kenaikan ini menunjukkan kalau perilaku tertib berkendara di jalan masih perlu ditingkatkan,"

katanya.

Terkait pengambilan barang bukti, Kurniawandari menyebut siapa pun pengendara yang terjaring Operasi Patuh Agung 2019 itu, wajib mengikuti sidang di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja. Dari tahapan itu kemudian dijatuhkan sanksi hukum dan pengambilan barang bukti baik kendaraan maupun SIM atau STNK.

"Prosesnya tetap melalui sidang tilang di PN. Pengambilan barang bukti yang sudah divonis PN itu tidak dikenakan biaya apa pun," jelasnya.

Pelanggaran berkendara di bawah umur kata Kurniawandari, menjadi pekerjaan rumah (PR - red), tidak saja kepolisian. Penting juga peran orangtua dan para guru di sekolah. Ke depan diperlukan pembinaan kepada anak-anak agar mereka berperilaku tertib saat mengendarai kendaraan di jalan raya. Kalau memang belum cukup umur berkendara yang dibuktikan dengan SIM, anak-anak bersangkutan diharapkan tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor.

"Kesadaran tata tertib berkendara ini perlu peran semua stakeholders, terutama

untuk pelanggaran di bawah umur. Kita mengharapkan orangtua dan guru. Ortu-nya diharapkan memberikan pembinaan anaknya agar jangan sesekali berkendara tanpa SIM, atau tanpa membawa STNK karena melanggar. Regulasi itu sudah dibuat negara, sehingga semua warga negara wajib mematuhi," jelasnya.

Kurniawandari menyebutkan selama Operasi Patuh itu korban kecelakaan lalu lintas (lakalantas) berhasil ditekan. Terutama jatuhnya korban meninggal dunia. Selama Operasi Patuh Agung tahun 2018, tercatat satu korban meninggal dunia. Sedangkan pada Operasi Patuh tahun ini tidak ada korban jiwa.

Selama ini, jajaran Polres Buleleng melakukan pencegahan korban lakalantas. Ini dilakukan dengan pemasangan spanduk pada ruas jalan rawan lakalantas di jalur Singaraja - Bedugul dan jalur lain di Bali Utara. Selain itu, sosialisasi tentang tertib berlalu lintas melalui media massa dan kampanye simpatisan dan program *Police Go to School* untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas. (mud)





KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Bali Post*

Kategori : *Pilkod*

Pilkod di Buleleng 8.615 Surat Suara Salah Cetak

Singaraja (Bali Post) -

Pencetakan surat suara pemilihan perbekel (pilkod) serentak tahun 2019 terganjal masalah. Dari 75 desa yang menggulirkan pilkod serentak, baru surat suara untuk 18 desa yang selesai dicetak. Dari jumlah surat suara yang sudah dicetak, terdapat surat suara untuk satu desa mengalami salah cetak. Jumlah surat suara yang salah cetak itu teramat 8.615 lembar. Atas masalah itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menuntut rekanan pemenang tender agar mencetak surat suara pengganti.

Surat suara yang salah cetak itu untuk Desa Pejajaran, Kecamatan Gerokgak. Harusnya pada lembar surat suara itu tertulis "Desa Pejajaran, Kecamatan Gerokgak" tetapi tercetak "Desa Pejajaran, Kecamatan Buleleng". Kesalahan cetak itu ditemukan saat Pilkod Kabupaten dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Buleleng melakukan monitoring setelah surat suara untuk 18 desa diterima dari pencetakan pada Rabu (11/9) lalu.

Kepala Dinas PMD Made Subur mengatakan, salah cetak surat suara untuk Desa Pejajaran itu murni kesalahan rekanan CV Delima Denpasar. Subur mengaku telah melaporkan kesalahan cetak itu dan menuntut rekanan segera mencetak surat suara pengganti. "Ini tanggung jawab rekanan karena mereka yang salah mencetak, dan kita sudah koordinasikan agar dicetak surat suara pengganti," katanya.

Menurut Subur, surat suara yang sudah tercetak dengan benar, untuk sementara disimpan di kantor PMD, sambil menunggu pengiriman surat suara untuk desa yang lain. Nantinya, surat suara itu akan dipilah sesuai dengan desa peserta pilkod kemudian dilipat. Dalam pemilahan dan pelipatan surat suara tersebut, PMD melibatkan panitia pilkod desa yang dikoordinir staf PMD. Ini dilakukan untuk mempercepat pemilahan dan pelipatan. Rencananya, surat suara itu didistribusikan ke masing-masing desa, tiga hari sebelum pencoblosan pada 31 Oktober 2019 mendatang. "Kalau dilakukan di kabupaten jelas tidak memungkinkan, sehingga kami melibatkan panitia pilkod di desa. Nanti setelah pelipatan dan dipilah sesuai desa, kita rapatkan lagi untuk teknis pendistribusian pada H-3 pencoblosan," jelasnya. (kmb38)